

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ardhiansyah Agis. 2011. *Pembakuan Nama Pulau di Indonesia Sebagai Upaya Untuk Menjaga Kedaulatan Negara Republik Indonesia*. Semarang: Rajawali Pers.
- Arif Satria. 2009. *Pesisir Dan Laut Untuk Rakyat*. Bogor : Penerbit IPB Press.
- Bengen. 2011. *Menuju Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis DAS*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bengen D G. 2010. *Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Lautan. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB*. Bogor. Rajawali Pers.
- HS, Salim. 2013. *Penerapan Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. Jakarta :PT. Rajagrafindo.
- Khaleed, Badriyah. 2014, *Legislative Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, Yogyakarta: Medpress Digital.
- Mathew Miles dan Michel Huberman, 2009, *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Jakarta : UI Pres.
- Parlindungan A P. 2015. *Hak Pengelolaan Menurut Sistem Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Rais Jacob, Ginting Sapta Putra, dkk. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Salle Aminuddin, Saleng Abrar, dkk. 2011. *Bahan Ajar Hukum Agraria*. Jakarta : Grafika Utama.
- Subarsono AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supriyadi. 2010. *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah (Menemukan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Atas Eksistensi Tanah Aset Daerah)*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Sutedi Andrian. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Jurnal :**

Abelshausen, B: Vanwing, T, dkk. 2015. Participatory Integrated Coastal Zone Management in Vietnam: Theory Versus Practice Case Study: Thua Thien Hue Province. *Journal of Marine and Island Culture*. 4.

Dahuri, Rohmin. 2009. Kebutuhan Riset Untuk Mendukung Implementasi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu. *Jurnal Pesisir Dan Lautan (Indonesian Journal Of Coastal And Marine Resources)*. Vol. 1 No. 2.

Effendy Mahfud. 2009. Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu: Solusi Pemanfaatan Ruang, Pemanfaatan Sumberdaya Dan Pemanfaatan Kapasitas Asimilasi Wilayah Pesisir Yang Optimal dan Berkelanjutan. *Jurnal Kelautan*. Vol. 2. No. 1.

Falkland T. 2010. Water Resources Assessment, Development and Management for Small Tropical Island. Didalam: Hehanusa PE dan Haryanti GS, editor. *Water Resources Assessment in Small Island and the Coastal Zone*. Vol. 3 No. 5

Ridha Saifur. 2017. Mukim Sebagai Pengelola Wilayah Pesisir Secara Berkelanjutan. *Jurnal Magistra*, No. 101. ISSN : 0215-9511.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

### **Internet**

Surat Edaran Kepala Dishidros Mabes TNI-AL No SE/1241/IV/2012 tanggal 1 Februari 2020 tentang Data Wilayah Negara Kesatuan Indonesia.

<http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/533771/Laut%20Indonesia%20dalam%20Krisis.pdf>

